

PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B YOGYAKARTA

I Kadek Sudiarsana¹
Niken Subekti Budi Utami²

INTISARI

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan kemandirian narapidana di LPP Kelas II B Yogyakarta dan mengetahui kesesuaian pembinaan kemandirian narapidana dengan tujuan pemasyarakatan. Tujuan pemasyarakatan yaitu membentuk WBP menjadi manusia seutuhnya; menyadari kesalahan; memperbaiki diri; tidak mengulangi kembali tindak pidana; diterima kembali oleh lingkungan masyarakat; berperan aktif dalam pembangunan; dan hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Akan tetapi kemudian, apakah pembinaan kemandirian yang diberikan kepada narapidana tersebut telah sesuai dan mewujudkan tujuan pemasyarakatan yang telah disepakati.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah diperoleh data dan dokumen yang dihimpun dari penelitian kepustakaan dan penelitian kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif.

Adapun dari penelitian dapat disimpulkan bahwa, *Pertama* bahwa Pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana di LPP Kelas II B Yogyakarta secara umum telah sesuai dengan UU Pemasyarakatan, akan tetapi pembinaan narapidana masih belum optimal. Pelaksanaan penentuan pola pembinaan belum melibatkan Bapas yang semestinya melakukan Litmas, dan *assessment* belum melibatkan *assessor* dan pelbagai faktor yang menjadi kendala seperti sarana prasarana, minimnya pengetahuan SDM, dan keterbatasan waktu. *Kedua*, Kesesuaian pembinaan kemandirian di LPP Kelas II B Yogyakarta dengan tujuan pemasyarakatan secara umum telah sesuai. Akan tetapi, jangkauan daripada pembinaan kemandirian yang diterapkan tidak mencakup seluruh tujuan pemasyarakatan. Sebab tujuan agar “Tidak mengulangi tindak pidana” dan “dapat diterima kembali oleh masyarakat” belum terwujud. Hal itu tidak serta merta merupakan gagalnya pembinaan yang diberikan oleh Lapas, namun terdapat faktor lain yang turut berpengaruh diantaranya, faktor lingkungan, gaya hidup/*life style*, ekonomi, dan karakter yang dimiliki oleh narapidana yang bersangkutan, dan permasalahan mendasar Lapas.

Kata kunci: Pembinaan Kemandirian, Narapidana, Tujuan Pemasyarakatan.

¹ Mahasiswa Program Studi Sarjana, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

² Dosen Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

FOSTERING THE INDEPENDENCE OF PRISONERS IN REALIZING THE PURPOSE OF CORRECTIONAL SYSTEM IN THE YOGYAKARTA CLASS II B WOMAN CORRECTIONAL INSTITUTION

I Kadek Sudiarsana¹
Niken Subekti Budi Utami²

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of prisoners' independence guidance in LPP Class II B Yogyakarta and to find out the suitability between the prisoner independence development and the purpose of correctional system. The purpose of correcting is to form WBP into a whole person; aware of mistakes; improve oneself; does not repeat the crime; to be accepted by the community; play an active role in development; and live naturally as a good and responsible citizen. Finally, the study wants to find out whether the independence guidance given to these prisoners is in accordance with the agreed-upon penal objectives.

This research is normative and empirical research. It uses the primary, secondary and tertiary legal materials. In obtaining the data and documents compiled from library research, the research uses the qualitative descriptive to analyze the research.

As for the research, it can be concluded that; firstly, the implementation of independence guidance on prisoners in LPP Class II B Yogyakarta in general is in accordance with the Correctional Law, however the inmate guidance is still not optimal. The designation of the pattern of guidance has not involved Bapas, which should carry out Litmas, and the assessment also has not involved assessors. Various factors that have become obstacles such as infrastructure, lack of knowledge of human resources, and time constraints. Second, the suitability of independence guidance in LPP Class II B Yogyakarta with its purpose of correctional facilities in general is appropriate. However, the scope of the independence development that is implemented does not cover all prison purposes. It is because the purpose of "not repeating criminal acts" and "being accepted back by society" has not yet materialized. This is not necessarily the failure of the guidance provided by the Lapas, but there are other factors that influence, among others; environmental factors, lifestyle, economy, and the character possessed by the prisoners concerned, and the basic problems of Lapas like overcapacity.

Keywords: Fostering Independence, Prisoners, Correctional Objectives.

¹ Student Criminal Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

² Lecture Criminal Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada